

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, pendidikan adalah usaha orang tua atau generasi tua untuk mempersiapkan anak atau generasi mudanya agar mampu hidup secara mandiri dan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam hidupnya dengan sebaik-baiknya dimasa yang akan datang sebagai generasi penerus. Setiap kelompok masyarakat, atau suku bangsa, mempunyai cara sendiri-sendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan tujuan atau pengertian/pemahaman mereka masing-masing tentang hidup dan kehidupan ini. Tujuan dan pemahaman tentang arti hidup dan kehidupan itu, terwujud dalam bentuk nilai-nilai dan norma-norma yang mereka hayati dan pelihara serta hormati bersama. Orang tua atau generasi tua berkepentingan untuk mewariskan nilai-nilai dan norma-norma hidup dan kehidupan tersebut kepada anak atau generasi mudanya. Agar generasi muda mampu menghayati dan hidup di dalam dan sesuai dengan norma itu, maka orang tua atau generasi tua pun mempersiapkan anak atau generasi muda dengan mewariskan segala pengalaman, pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang melatar belakangi nilai-nilai dan norma-norma hidup dan kehidupan itu. Dan itulah yang dimaksud dengan pendidikan.¹

Pengawasan merupakan salah satu bagian dalam penyelenggaraan pendidikan terbentuk usaha-usaha perbaikan dalam pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, pengembangan bahan, alat dan sumber belajar, teknik dan evaluasi pembelajaran, serta berbagai aktifitas layanan administratif yang menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Sejalan dengan paradigma baru yang dianut dalam Undang-Undang. No.20 tahun 2003, yang lebih banyak melepaskan otoritas-otoritas pemerintah kepada

¹Tadjab, *Perbandingan Pendidikan : Studi Perbandingan tentang Beberapa Aspek Pendidikan Barat Modern, Islam dan Nasional*, (Surabaya : Karya Abditama, 1994), cet. ke-1 hlm. 134.

masyarakat, maka pengawasan dalam pendidikan sebagaimana diatur dalam UUSPN tersebut adalah, bahwa pengawasan sekolah pada semua jenjang dan jenis, dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah (UUSPN No.20 Th. 2003, pasal 66 ayat 1). Kemudian, pada ayat 2 pasal yang sama ditegaskan, bahwa pengawasan tersebut dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.² Pengawasan pada umumnya diartikan dengan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan³

Pada dasarnya rencana dan pelaksanaan merupakan satu kesatuan tindakan, walaupun hal ini jarang terjadi. Pengawasan diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil tercapai. Menurut Murdick pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan sebagaimana pun rumit dan luasnya suatu organisasi. Proses dasarnya terdiri dari tiga tahap, (1) menetapkan standar pelaksanaan, (2) pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar, dan (3) menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana.⁴

Sementara menurut Lubis, yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan manager yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dan atau dengan hasil yang dikehendaki⁵. Khusus pengawasan sekolah yang terkait dengan proses pembelajaran, dilakukan oleh pengawas sekolah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan segala unsurnya, baik pada jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA serta sekolah kejuruan lainnya (Pasal 13 Kepmendiknas No.097/U/2002). Pengawas sekolah bertugas melakukan pengawasan terhadap proses pembelajaran di sekolah.

²Anonymous, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta : Darma Bakti, 2003), hlm. 37.

³M Amin Thaib, et. Al., *Profesionalisme Pelaksanaan Pengawasan Pendidikan*, (Jakarta : Depag RI, 2005), hlm. 28.

⁴Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 1.

⁵*Ibid.*, hlm. 29.

Dengan demikian, client pengawas adalah para guru pada semua jenjang dan jenis pendidikan formal. Sementara untuk bidang program dan akuntabilitas keuangannya, dilakukan oleh inspektorat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan bidang program dan keuangan instansi negara.⁶

Visi pengawasan dikemukakan dalam Kepmendiknas No. 097 Tahun 2002, adalah terwujudnya sistem pengawasan yang mampu mendorong penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien sehingga mendorong terwujudnya pendidikan bermutu, merata dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 2 Kepmendiknas No.097 Tahun 2002). Sejalan dengan visi tersebut, kepengawasan di era reformasi ini didesign dengan misi sebagai berikut.

1. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan;
2. Mendorong terwujudnya akuntabilita unit kerja (sekolah);
3. Meningkatkan profesionalisme;
4. Menegakkan etika dan moral penyelenggara, pengelola dan pelaksana pendidikan.

Pengawasan dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip, sebagaimana dikemukakan pada pasal 6 Kepmendiknas No.097/U/2002. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Prinsip Manajemen*, yakni bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen.
2. *Pencegahan*, yakni bahwa pengawasan dilakukan dengan memperhatikan kemajuan yang harus dicapai pada masa yang akan datang, sehingga dapat menghindarkan dari kemungkinan kesalahan-kesalahan.
3. *Perbaikan dan penyempurnaan*, yakni bahwa pengawasan dilakukan dengan terus berupaya menemukan berbagai penyebab terjadinya

⁶Dede Rosada, "Tantangan dan Peran Pendidik dan Pengawas PAIS dalam Pendidikan Kini dan Mendatang," *Jurnal Guru Besar FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 09 November 2000. hlm. 19.

kesalahan dan melakukan perbaikan-perbaikan sehingga bisa memberikan layanan terbaik dimasa yang akan datang.

4. *Integritas*, yakni bahwa kegiatan pengawasan dilakukan para pengawas dengan penuh integritas profesi sebagai bagian dalam organisasi yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah.
5. *Pemberdayaan*, yakni bahwa pengawasan dilakukan dengan memberdayakan berbagai potensi yang dimiliki para guru sehingga kemampuannya itu berdaya guna untuk kemajuan pendidikan di sekolahnya.

Disamping itu semua, proses pengawasan harus dilakukan secara praktis, yakni sesuai dengan kondisi sekolah tempat para pengawas melakukan tugas pengawasannya. Hasil-hasil pengawasan harus dilaporkan oleh para pengawas sehingga menjadi bahan untuk melakukan berbagai perbaikan dimasa yang akan datang.

Rumusan visi dan misi kepengawasan yang dikeluarkan dalam bentuk Kepmendiknas No. 97 th 2002, walaupun mendahului Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun semangat dan ruhnya sama, yaitu semangat perubahan menuju yang lebih baik. Pengawas berada pada posisi strategis dalam memelihara komitmen untuk menjadi bagian dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas pendidikan. Khususnya untuk menghasilkan lulusan yang bermutu yang harus dimulai dengan perbaikan proses pembelajaran di sekolahnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat khususnya tentang kenakalan remaja, dekadensi moral, mutu pendidikan rendah, siswa mengalami penurunan prestasi, guru suka demo menuntut gaji, dan lainnya. Itu semua yang menjadi sasaran adalah dunia pendidikan, dengan tuduhan telah gagal, gurunya tidak benar mengajar, malas, bisnis di tempat lain, tidak profesional dan sebagainya.

Terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, ada tiga syarat utama yang harus diperhatikan dalam melakukan pembangunan di dunia pendidikan, yaitu, sarana gedung, buku yang berkualitas, dan guru atau tenaga kependidikan yang profesional.⁷ Persoalan tenaga ahli atau profesionalisme guru dalam pendidikan Islam bukanlah persoalan kecil, tetapi merupakan permasalahan besar yang memerlukan pemecahan. Karena mana mungkin Pendidikan Islam dapat mencapai tujuannya, jika pelaksanaan pendidikannya bukanlah seorang yang ahli dalam bidangnya. Apalagi dalam pendidikan Islam, seorang guru tidak hanya terbatas pada melakukan transfer ilmu, tetapi lebih dari itu yaitu, mendidik yang lebih bersifat menanamkan nilai-nilai pada anak didik di luar ilmu pengetahuan yang bersifat bebas itu.⁸ Hal ini sangat berpengaruh terhadap peranan guru dalam proses pendidikan, apakah sebagai motor atau hanya sebagai fasilitator.

Peran guru dalam memberikan ilmu apapun yang diajarkannya (dalam pendidikan Islam) kepada anak didik haruslah dilandasi dengan nilai atau jiwa Islami. Artinya nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak didik itu harus dibentuk oleh guru. Sebagaimana Noeng Muhadjir mengatakan bahwa aktifitas pendidikan, bukan sekedar mengalihkan informasi atau pengetahuan, melainkan memberikan pengetahuan sekaligus implikasi nilai (baik buruk), dan juga dengan menggunakan cara/jalan yang normatif baik.⁹ Maksudnya ada upaya terprogram dari para pendidik yang menjiwai, guna membantu subjek didik agar dapat berkembang ke tingkat normatif yang lebih baik.

Islam sendiri memerintahkan bahwa suatu urusan atau pekerjaan itu haruslah dilakukan atau diselesaikan secara profesional. Artinya mereka

⁷E Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional; Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2007), cet. ke-5, hlm. 3.

⁸Imam Syafei, *Konsep Guru Menurut al-Ghazaly : Pendekatan Filosofis Pedagogis*, (Yogyakarta : Duta Pustaka, 1992), hlm. 27.

⁹Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial : Teori Pendidikan Sosial Kreatif*, (Yogyakarta : Rake Surasin, 2000), hlm. 10.

yang berhak untuk melakukannya adalah orang yang benar-benar ahli dibidangnya. Permasalahan pendidikan misalnya, bagaimana agar anak didik sadar dan mampu menyikapi nilai-nilai yang diperoleh di sekolah, dan juga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal adalah menjadi penting peran dan keberadaan guru yang ahli dibidangnya.

Berangkat dari sinyalemen di atas, profesionalisme guru dalam melakukan proses mendidik anak pada lembaga pendidikan Islam atau pendidikan secara umum, menjadi sangat urgen dibahas dan diwujudkan dalam realitas dunia pendidikan kita. Tentunya, hal ini menjadi sebagai sebuah solusi agar pendidikan Islam lebih bermutu, sehingga dapat mencapai tujuannya. Kiranya tidak mengada-ada ketika penulis mencoba untuk konsen melakukan kajian kepada pola kepengawasan yang tujuannya untuk meningkatkan profesionalisme guru PAI, dengan mengajukan teori-teori dan buku-buku, kebijakan-kebijakan untuk mendukung konsep.

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa pendidikan, termasuk didalamnya pendidikan Islam, dapat dipandang dari dua dimensi pendidikan sebagai teori dan pendidikan sebagai praktek pendidikan berupa teori berupa pemikiran manusia mengenai masalah kependidikan dan upaya memecahkannya secara mendasar dan sistematis. Sedangkan pendidikan sebagai praktek merupakan aktivitas manusia mendidik peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu yang diidealkan.¹⁰

Dalam studi ini, yang dimaksud dengan pendidikan Islam adalah pendidikan dalam pengertian kawasan teoritis, yakni berupa pemikiran yang mendasar dan sistematis tentang pendidikan Islam. Oleh karena pendidikan Islam memiliki banyak aspek diantaranya yang menyangkut profesi guru, dan kepengawasan dalam perspektif pendidikan Islam.

Dari uraian di atas penulis ingin mengemukakan dan menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan Islam butuh guru yang profesional, untuk mencapai profesionalisme diperlukan pembinaan-

¹⁰Imam Barnadib, *Dasar-dasar Pendidikan Memahami Makna dan Perspektif Beberapa Teori*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 8.

pembinaan berupa kepengawasan yang terpola. Adapun judul penelitian ini adalah **STRATEGI PENGAWASAN UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM** (*Penelitian pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung*).

B. Perumusan Masalah

Dari uraian penelaahan di atas penulis melakukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Strategi apa yang digunakan dalam Pengawasan Guru PAI SD di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan strategi pengawasan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru PAI SD di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?
3. Apa faktor penghambat dan pendukung Pelaksanaan Strategi Pengawasan di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?
4. Perubahan apa yang terjadi pada Guru PAI SD di Kecamatan Cileunyi setelah dilaksanakannya strategi pengawasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui strategi pengawasan Guru PAI SD di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?
2. Mengetahui pelaksanaan strategi pengawasan dalam upaya peningkatan profesionalisme guru PAI SD di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
3. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan strategi pengawasan di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
4. Mengetahui perubahan yang terjadi pada guru PAI SD di Kecamatan Cileunyi.

D. Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan kegunaan penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan lebih lanjut dari teori-teori yang sudah ada, karena penelitian ini dilakukan tidak hanya mengambil sumber dari literatur yang sudah ada melainkan juga masukan-masukan dari pihak-pihak yang merasakan dan berkaitan langsung dengan penelitian ini termasuk didalamnya kepala sekolah dan guru-guru PAI di Kecamatan Cileunyi.

Diharapkan apa yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat menambah wawasan dan pola berfikir seluruh unsur pengawasan secara ilmiah dan memperkaya pemikiran dalam pendidikan Islam dan juga kepada siapa saja yang peduli terhadap masalah pendidikan dalam memperkaya khasanah pola pengawasan yang bisa membentuk guru profesionalisme dengan contoh lokasi penelitian. Selain itu, melalui teori yang digunakan dalam peneliti dapat mengetahui kondisi dan situasi objek penelitian secara lebih komprehensif. Sehingga teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan pola pengawasan Guru PAI di masa yang akan datang. Dan dengan analisis SWOT yang digunakan dapat diketahui pula kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangannya.

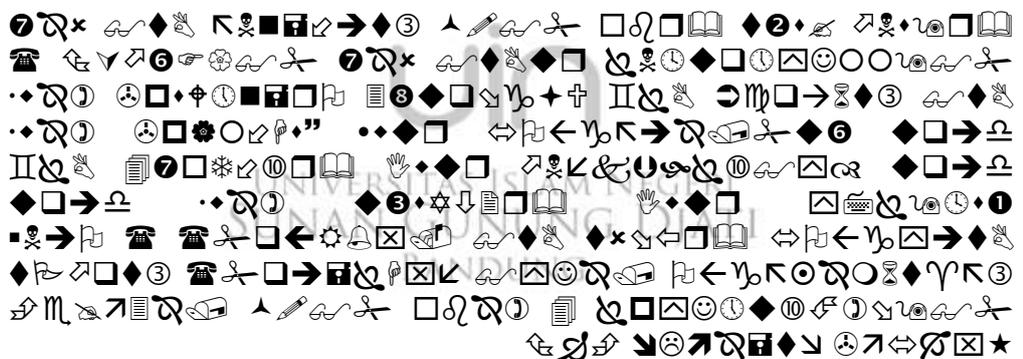
2. Secara Praktis dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :
 - a. Sebagai bahan evaluasi pada para pengawas dimasa yang akan datang.
 - b. Sebagai bahan rujukan dalam meningkatkan profesionalisme Guru Pendidikan Agama.
 - c. Mendorong para akademisi dan pengawas untuk melanjutkan dan mengkaji hal serupa, dan sebagai bahan bacaan bagi siapa saja

yang berminat pada kajian pemikiran tentang pola pengawasan dan guru profesional

- d. Dikarenakan peneliti adalah sebagai pengawas Pendidikan Islam maka hasil penelitian ini bisa terus dipantau dan dijadikan sebagai dasar upaya peningkatan berikutnya untuk mencapai hasil penelitian yang lebih baik lagi.

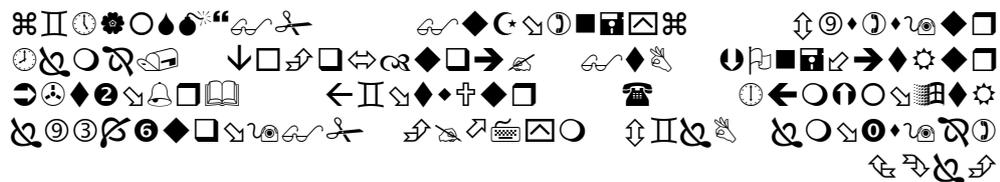
E. Kerangka Pemikiran

Allah itu meliputi segala ruang, waktu dan tempat dengan ilmunya, nilai ini harus terus dipelihara dan dikembangkan dalam diri setiap manusia, dan itu adalah hakikat dari sebuah pengawasan dimana manusia harus sadar bahwa ada yang mengawasi selamanya supaya terkontrol dari perbuatan dosa. Melihat hakikat itu tentu dalam melaksanakan tugas sehari-hari manusia perlu adanya pengawasan untuk pembinaan, pengawalan dan kontrol dari yang berhak mengadakan pengawasan sesuai peraturan yang berlaku. supaya mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.



“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. Dan tiada lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. Dan tiada pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”¹¹

¹¹Q S Al-Mujadalah, 56 : 7



*Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.*¹²

Mengacu pada SK Menpan Nomor 381 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya, Keputusan bersama Mendikbud Nomor 0342/0/1996 dan Kepala Badan Administrasi kepegawaian Negara nomor 38 tahun 1996 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pengawas serta Keputusan Mendikbud nomor 020/U/1998 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, PP N0.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dapat dikemukakan tentang tugas dan tanggung jawab satuan pendidikan sebagai berikut;

1. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada TK, SD, SLB, SLTP, dan SLTA
2. Meningkatkan kualitas proses belajar-/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan

Tugas dan tanggung jawab yang pertama merujuk pada supervisi atau pengawasan manajerial sedangkan tugas pokok yang kedua merujuk pada supervisi atau pengawasan akademik. Pengawasan manajerial pada dasarnya memberikan pembinaan, penilaian, dan bantuan/bimbingan mulai dari rencana program, proses, sampai dengan hasil. Bimbingan dan bantuan diberikan kepada kepala sekolah dan seluruh staf sekolah dalam pengelolaan sekolah atau penyelenggaraan pendidikan di sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah. Pengawasan akademik berkaitan dengan membina dan membantu guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran/bimbingan dan kualitas hasil belajar siswa.

¹²Q S. *Qaf*, 50 :16

Sejalan dengan tugas dan tanggung jawab pengawas satuan pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas maka kegiatan yang harus dilaksanakan pengawas yakni;

1. Melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah.
2. Melakukan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya,
3. Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah.

Dari kajian tentang tugas dan tanggung jawab pengawas sebagaimana dikemukakan di atas maka perspektif kedepan, tugas pokok pengawas satuan pendidikan sebagai supervisor pendidikan baik supervisi akademik maupun supervisor manajerial, terdiri atas 5 bidang yakni; monitoring/pemantauan, supervisi, penilaian, pembinaan/pengembangan, pelaporan dan tindak lanjut.

Tugas pokok monitoring/pemantauan meliputi; memantau penjaminan/standar mutu pendidikan, memantau penerimaan siswa baru, memantau proses dan hasil belajar siswa, memantau pelaksanaan ujian, memantau rapat guru dan staf sekolah, memantau hubungan sekolah dengan masyarakat, memantau data statistik kemajuan sekolah, memantau program-program pengembangan sekolah.

Tugas pokok supervisi meliputi mensupervisi kinerja sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, kinerja staf sekolah, pelaksanaan kurikulum/mata pelajaran, pelaksanaan pelajaran, ketersediaan dan pemanfaatan sumberdaya, manajemen sekolah, dan aspek lainnya seperti ; keputusan moral, pendidikan moral, kerjasama dengan masyarakat, mensupervisi sumber-sumberdaya sekolah baik sumberdaya manusia, material, financial dll, mensupervisi kegiatan antar sekolah binaannya,

kegiatan *in service training* bagi kepala sekolah, guru dan staf sekolah lainnya, mensupervisi pelaksanaan kegiatan inovasi sekolah.

Tugas pokok penilaian meliputi; penilaian, pengolahan dan analisis data atas hasil belajar/bimbingan siswa dan kaitannya dengan faktor guru; mengumpulkan dan mengelola data sumberdaya pendidikan, proses pembelajaran/bimbingan, lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap perkembangan hasil belajar/bimbingan siswa; Melaksanakan analisis komprehensif penilaian sebagai bahan untuk melakukan inovasi pendidikan di sekolah binaan.

Tugas pokok pembinaan/pengembangan meliputi; Memberikan bantuan dan bimbingan kepada guru tentang proses pembelajaran/bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar/bimbingan siswa; memberikan contoh pelaksanaan tugas guru dalam melaksanakan proses pembelajaran peserta didik /bimbingan peserta didik; Membina pelaksanaan pengelolaan sekolah, antara lain pengelolaan kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, sarana prasarana, dan hubungan kerja dengan unsur-unsur terkait dan yang lainnya; Memberi advis mengenai sekolah sebagai sistem, memberi advis kepada guru tentang pembelajaran yang efektif, memberi advis kepada kepala sekolah dalam mengelola pendidikan, memberi advis kepada tim kerja dan staf sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah, memberi advis kepada orangtua siswa dan komite sekolah terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, membina pengembangan inovasi sekolah, membina sekolah dalam akreditasi sekolahnya.

Tugas pokok pelaporan dan tindak lanjut meliputi tugas; melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Propinsi dan/atau Nasional, melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan ke sekolah binaannya, *Komite Sekolah* dan *stakeholder* lainnya; menetapkan langkah-langkah alternatif tindak lanjut untuk program pengawasan selanjutnya.

Untuk melaksanakan semua tugas di atas, pengawas satuan pendidikan harus terlebih dahulu menyusun program kerja kepengawasan untuk program tahunan dan program setiap semester pada sekolah yang dibinanya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas satuan pendidikan, setiap pengawas memiliki kewenangan dan hak-hak yang melekat pada jabatannya. Beberapa kewenangan yang ada pada pengawas adalah kewenangan untuk ;

1. Bersama pihak sekolah yang dibinanya, menentukan program peningkatan mutu pendidikan dan menentukan/mengusulkan program pembinaan di sekolah binaanya,
2. Menyusun program kerja/agenda kerja kepengawasan, membicarakannya dengan kepala sekolah yang bersangkutan serta melakukan pembinaan pada sekolah binaannya,
3. Menentukan metode kerja untuk pencapaian hasil optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi dan program kerja yang telah disusun,
4. Menetapkan kinerja sekolah, kepala sekolah dan guru serta tenaga kependidikan lainnya beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, guna meningkatkan kualitas pendidikan.

Pendidikan akan maju jika komponen-komponen pendidikan berjalan seirama, garda terdepan dalam meningkatkan pendidikan adalah guru, dari itu pemerintah berupaya dengan berbagai kebijakan supaya pendidikan dikelola oleh guru dan tenaga yang profesional sehingga terhindar dari mal praktek yang dikejakan oleh guru sehingga membuat kerusakan mental dan cara pandang siswa yang akan merugikan dirinya dan berdampak kepada seluruh yang terkait.

Pekerjaan sebagai sebuah profesi menurut ajaran Islam harus dilakukan Karena Allah. Dalam kenyataannya pekerjaan itu dilakukan untuk orang lain. Tetapi niat yang mendasarinya adalah perintah Allah. Dari sisi ini kita mengetahui bahwa pekerjaan atau profesi itu didalam Islam dilakukan untuk

mengabdikan sekaligus pada dua obyek. Yaitu: pertama pengabdian kepada Allah, dan kedua pengabdian kepada manusia atau yang lain yang menjadi obyek pekerjaan itu sendiri. Pelaksanaan profesi dalam Islam mengandung unsur *transenden*. Hal ini yang menjadikan pengamalan profesi dalam Islam lebih tinggi nilai pengabdian dibandingkan dengan pengamalan profesi yang tidak didasari oleh keyakinan iman kepada Tuhan.¹³

Profesionalisasi berhubungan dengan profil guru, walaupun potret guru yang ideal memang sulit didapat namun kita boleh menerka profilnya. Guru idaman merupakan produk dari keseimbangan antara penguasaan aspek keguruan dan disiplin ilmu, keduanya tidak perlu dipertentangkan melainkan bagaimana guru tertempa kepribadiannya dan terasah aspek penguasaan materi. Kepribadian guru yang utuh dan berkualitas sangat penting karena dari sinilah muncul tanggung jawab profesional sekaligus menjadi inti kekuatan profesional dan kesiapan untuk selalu mengembangkan diri. Tugas guru adalah merangsang potensi peserta didik dan mengajarnya supaya belajar. Guru tidak membuat peserta didik menjadi pintar. Guru hanya memberikan peluang agar potensi itu ditemukan dan dikembangkan. Kejelian itulah yang merupakan ciri kepribadian profesional.¹⁴ Untuk mengangkat jabatan guru sebagai karier profesional, harus diterjemahkan menjadi berbagai upaya yang sistematis, konsisten, dan terjangkau oleh berbagai pihak dan instansi terkait.

Banyak para pakar pendidikan berbicara hal tersebut sesuai dengan prespektifnya masing-masing. Made Pidarta¹⁵ dalam tulisannya *Supervisi Pendidikan Kontekstual* memaparkan tentang penggunaan Istilah Pengawasan, Pengendalian dan supervisi, menurutnya *Pengawasan* adalah bagian dari administrasi. Kegiatan dilapangan dicatat lalu dilaporkan kepada ketua, sebagai umpan balik untuk perbaikan. *Pengendalian* adalah bagian dari manajemen. Kesalahan-kesalahan yang terjadi di lapangan langsung

¹³Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 11.

¹⁴Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 24.

¹⁵Made Pidarta, *Supervisi Pendidikan Kontekstual*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 35.

diperbaiki. Sedangkan *Supervisi* adalah Kegiatan Supervisi Hasil observasi pada proses supervisi dianalisis, dan diperbaiki untuk yang salah-salah.

Menurutnya juga, Kalau diperhatikan komunikasi di dunia pendidikan Indonesia, tidak akan pernah kita dengar kata “Supervisor”. Kata ini hanya dijumpai pada lembaga pencetak guru dan dosen ketika membahas mata kuliah Supervisi pendidikan. Jadi pemakaian kata supervisor di Indonesia hanya membahas dunia keilmuan saja. Kata atau istilah supervisor itu juga tidak ditemukan pada Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Begitu juga dalam Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam UUSPN hanya menyebut tenaga kependidikan adalah petugas administrasi, pengelola, pengembang, pengawas, dan pelayanan teknis. Tetapi dalam PPSNP ada istilah penilik untuk pendidikan nonformal dan pengawasan untuk pendidikan formal. Ini berarti menurut perundang-undangan ini kata supervisor diganti dengan pengawas untuk pendidikan Formal. Dan kedua-duanya untuk melakukan tugas supervisi, karena secara jelas disebutkan dalam peraturan ini.

Selanjutnya, Nanang Fattah¹⁶ dalam buku Landasan Manajemen Pendidikan, membahas tentang bagaimana supaya pengawasan berjalan efektif, antara lain ;

1. Pengawasan harus dikaitkan dengan tujuan, dan kriteria yang dipergunakan dalam sistem pendidikan, yaitu relevansi, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Tujuan-tujuan pendidikan dalam berbagai tingkatan, Mulai Tujuan Pendidikan Nasional (GBHN), Tujuan Institusional, Tujuan Kurikurel, Tujuan-tujuan mata pelajaran. Agar standar pengawasan pendidikan ini berfungsi efektif semua itu harus dipahami dan diterima oleh setiap anggota organisasi sebagai bagian integral, misalnya sistem Ebtanas sebagai kendali mutu pendidikan harus dianggap normal dan perlu.

¹⁶Nanang Fattah, *Landasan*, hlm. 25.

2. Sulit, tetapi standar yang masih dapat dicapai harus ditentukan. Ada dua tujuan pokok, yaitu; (1) untuk memotivasi, dan (2) untuk dijadikan patokan guna membandingkan dengan prestasi. Artinya jika pengawasan ini efektif akan dapat memotivasi seluruh anggota untuk mencapai prestasi yang tinggi.
3. Pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi.
4. Banyaknya pengawasan harus dibatasi, artinya jika pengawasan terhadap karyawan terlampau sering, ada kecenderungan mereka kehilangan otonominya dan dapat dipersepsi pengawasan itu sebagai pengekangan.
5. Sistem pengawasan harus dikemudi (*steering controls*) tanpa mengorbankan otonomi dan kehormatan manajerial tetapi flexible, artinya sistem pengawasan menunjukkan kapan, dan dimana tindakan korektif harus diambil. Misalnya pengawasan mempunyai implikasi emotioanal dan motivational yang berhubungan dengan konsekwensi fungsional dan disfungsional.
6. Pengawasan hendaknya mengacu pada tindakan perbaikan, artinya tidak hanya mengungkap penyimpangan dari standar, tetapi penyediaan alternatif perbaikan, menentukan tindakan perbaikan.
7. Pengawasan hendaknya mengacu pada prosedur pemecahan masalah, yaitu; menemukan masalah, menemukan penyebab, mengecek hasil perbaikan, mencegah timbulnya masalah yang serupa.

Lain halnya dengan Sehartian¹⁷, dalam bukunya *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan*, beliau memaparkan tentang Pengembangan Model Supervisi, Yang dimaksud dengan model dalam uraian ini ialah suatu pola, contoh; acuan dari supervisi yang diterapkan, ada berbagai model yang berkembang, yaitu:

1. Model supervisi yang konvensional (*Traditional*)

¹⁷Piet A Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan : dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), cet. ke-2, hlm. 21.

Model ini tidak lain dari refleksi kondisi masyarakat pada suatu saat. Pada saat kekuasaan yang otoriter dan feodal, akan berpengaruh pada sikap pemimpin yang otokrat dan korektif. Pemimpin cenderung untuk mencari-cari kesalahan.

2. Supervisi yang bersifat ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut;

Dilaksanakan secara berencana dan kontinu, sistematis dan menggunakan prosedur serta teknis tertentu, menggunakan instrumen pengumpulan data dan riil.
3. Model Supervisi Klinis

Supervisi klinis adalah proses membantu guru-guru memperkecil kesenjangan antara tingkah laku mengajar yang nyata dengan tingkah laku mengajar yang ideal. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa supervisi klinis adalah suatu proses pembimbingan yang bertujuan membantu pengembangan profesional guru dalam pengenalan mengajar melalui observasi dan analisis data secara objektif, teliti sebagai dasar untuk usaha mengubah perilaku mengajar guru.
4. Model Supervisi Artistik

Mengajar adalah suatu pengetahuan (*knowledge*), mengajar itu suatu keterampilan (*skill*), tapi mengajar juga kiat (*art*). Sejalan dengan tugas mengajar supervisi juga sebagai kegiatan mendidik dapat dikatakan bahwa supervisi adalah suatu pengetahuan, suatu keterampilan dan juga suatu kiat.

Supervisi itu menyangkut bekerja untuk orang lain (*working for the others*), bekerja dengan orang lain (*working with the others*), bekerja melalui orang lain (*working through the others*). Dalam hubungan bekerja dengan orang lain maka suatu rantai hubungan kemanusiaan adalah unsur utama. Hubungan manusia dapat tercipta bila ada kerelaan untuk menerima orang lain sebagaimana adanya hubungan itu dapat tercipta bila ada unsur kepercayaan. Saling percaya, saling

mengerti, saling menghormati, saling mengakui, saling menerima seseorang sebagaimana adanya. Hubungan tampak melalui pengungkapan bahasa, yaitu supervisi lebih banyak menggunakan bahasa penerimaan ketimbang bahasa penolakan.

Seirama dengan pendapat para pakar dalam pendidikan di atas, Ngalim Purwanto¹⁸, menambahkan bahwa, pengawasan itu ada yang disebut pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Di dalam dunia pendidikan kita istilah supervisi disebut juga pengawasan atau kepengawasan. Dalam dekade tahun delapan puluhan, di departemen-departemen khususnya Departemen Pendidikan dan kebudayaan mulai dikenal dan bahkan ditingkatkan pelaksanaan suatu jenis supervisi yang disebut "*pengawasan melekat*". Apa yang disebut dengan "pengawasan melekat"? Apa bedanya dengan "pengawasan fungsional"?

Istilah "*pengawasan melekat*" diturunkan dari bahasa asing *built incontrol* yang berarti suatu pengawasan yang memang sudah dengan sendirinya (melekat) menjadi tugas dan tanggung jawab semua pimpinan, dari pimpinan tingkat atas sampai dengan pimpinan yang paling bawah dari semua organisasi atau lembaga. Dengan kata lain, semua orang yang menjadi pemimpin, apapun tingkatannya, adalah sekaligus sebagai pengawas terhadap bawahannya masing-masing. Oleh karena itu setiap pemimpin adalah juga sebagai pengawas, maka kepengawasan yang dilakukan itu disebut "pengawasan melekat".

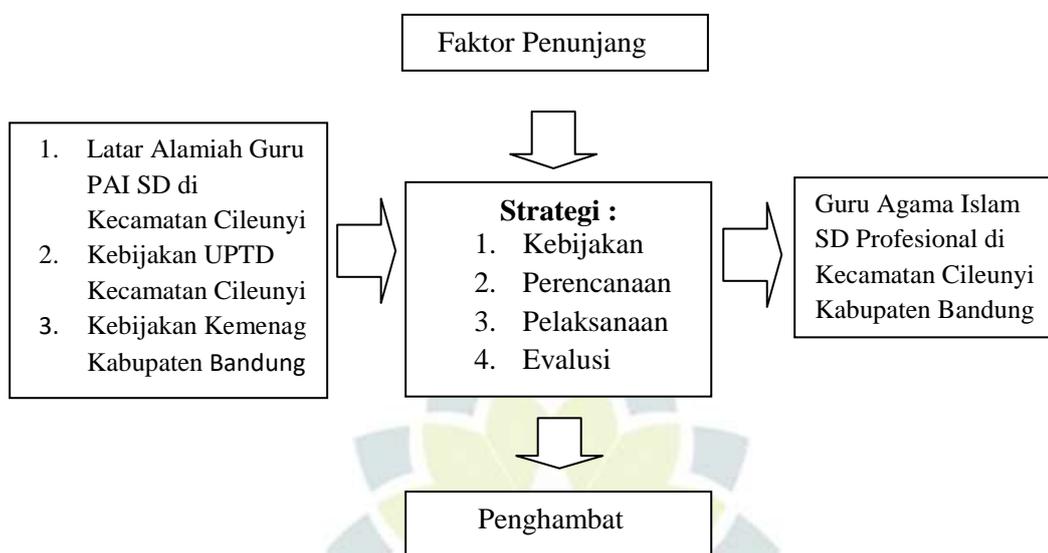
Sedangkan yang dimaksud dengan "pengawasan fungsional" adalah kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang yang fungsi jabatannya sebagai pengawas. Sebagai contoh konkrit tentang pengawasan fungsional, dapat dilihat dalam struktur organisasi Departemen P dan K. Dalam struktur tersebut, khususnya dilingkungan Inspektorat Jendral, terdapat delapan inspektorat yang masing-masing dipimpin oleh seorang inspektur, yaitu sebagai berikut : Inspektur Kepegawaian, Inspektur

¹⁸Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), cet. ke-10, hlm. 92.

Keuangan, Inspektur perlengkapan, Inspektur Pendidikan Dasar dan Menengah, Inspektur Pendidikan Tinggi, Inspektur PLS, Pemuda dan Olahraga, Inspektur Kebudayaan, dan Inspektur Proyek Pembangunan.

Dari hasil pengamatan dan kajian pustaka diatas, peneliti memandang perlu dan cocok untuk mengadakan penelitian supaya mendapatkan kajian ilmiah yang lebih luas dan aplikatif, dengan harapan hasil dari penelitian ini bisa memberikan kontribusi kepada dunia pendidikan. Perlu diketahui peneliti adalah sebagai Pengawas pendidikan Agama Islam di lingkungan Kementerian Agama, yang ditugaskan di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Bandung, adanya sistem pengawasan dalam pendidikan diharapkan mampu meningkatkan dunia pendidikan, dalam hal ini terkait didalamnya merubah *mind set* guru dari konvensional ke profesional, untuk menuju kondisi pendidikan yang lebih maju. Pembinaan dan pengawasan dalam jabatan (*Inservice Training*) akan berdampak positive dalam profesionalisasi jabatan guru, yang diberi peluang besar oleh keputusan pemerintah untuk mengfungsionalkan jabatan guru. Maka setelah menganalisa pendapat para ahli pendidikan berbicara tentang pengawasan, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pola pengawasan yang ideal untuk meningkatkan profesionalisme guru PAI SD Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Secara sistematis, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada model berikut ini.



Gambar. 1

Bagan Skema Kerangka Pemikiran

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif sehingga metode yang tepat digunakan adalah metode deskriptif. Dalam penerapannya, metode ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka representasi objektif tentang realitas yang terdapat dalam masalah yang diteliti.¹⁹ Atau dengan kata lain dapat juga diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mendeskripsikan berbagai hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan, melacak dan mensistematisir sedemikian rupa.

¹⁹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 63

Selanjutnya dengan keyakinan tertentu diambil kesimpulan umum dari data-data yang terkumpul tentang objek permasalahannya.²⁰

Lexy Moleong²¹ mendefinisikan pendekatan kualitatif ini sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Nana Syaodih²² menjelaskan bahwa penelitian dengan metode deskriptif ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Senada dengan pendapat di atas, Winarno Surachmad²³ menyebutkan bahwa penyelidikan dengan memakai metode deskriptif bertujuan untuk memecahkan permasalahan pada masa sekarang, diantaranya ada penyelidikan dengan penuturan, analisis dan klasifikasi. Metode ini juga bisa disebut metode analitik.

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membuat deskripsi atau gambaran nyata mengenai strategi pengawasan untuk meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

²⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Fak Psikologi UGM, 1987), hlm. 3.

²¹Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6.

²²Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Rosdakarya, 2008), hlm. 54.

²³Winarno Surachman, *Penelitian Ilmiah, Dasar, Metoda dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 134. Metode pengumpulan data juga dilakukan dengan menuliskan, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikan. Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1994), hlm. 30.

2. Jenis Data

Menurut Lofland, sebagaimana dikutip Lexy Moleong²⁴ bahwa jenis data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan dapat berupa sumber data tertulis, dokumen, foto, dan lainnya. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai, merupakan jenis data utama. Adapun penggalan data dapat juga dilakukan melalui pencatatan, perekam.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yang berkaitan dengan strategi pengawasan untuk meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian pada guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Cileunyi. Jenis data berupa kata-kata atau tindakan diambil dari lapangan adalah data-data yang berhubungan dengan fakta yang ada dilokasi penelitian berupa kata-kata dan tindakan yang berkaitan dengan strategi pengawasan untuk meningkatkan profesionalisme guru PAI SD di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Sedangkan data tertulis diperoleh dari dokumen UPTD Pendidikan Kecamatan Cileunyi dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian.

3. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli (sumber pertama) atau data dari tangan pertama. Data primer digali dari sumber data yang tepat diperoleh dari lapangan secara langsung melalui observasi dan wawancara. Sumber data yang menjadi subjek dalam memberikan data yang diperlukan peneliti pada penelitian ini adalah :

1) Informan

Informan yang dimaksudkan oleh peneliti disini adalah orang yang telah menyampaikan informasi kepada peneliti tentang data-data

²⁴Lexy J Moleong, *Metodologi*, hlm. 157.

yang diperlukan yang berhubungan dengan strategi pengawasan untuk meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Cileunyi. Informan pada penelitian ini yaitu : (1) Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cileunyi, untuk memperoleh data tentang kondisi objektif guru PAI SD di Kecamatan Cileunyi dan perubahan yang terjadi setelah dilakukannya rangkaian proses pengawasan sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru, sesuai dengan rumusan masalah ke satu dan ke lima tentang bagaimana kondisi objektif dan perubahan yang terjadi ada guru setelah dilakukan pengawasan, (2) Pengawas untuk memperoleh data tentang strategi, pelaksanaan strategi pengawasan untuk meningkatkan profesionalisme guru pada guru PAI SD di Kecamatan Cileunyi dan faktor penghambat dan penunjangnya. Selain dari pengawas data tentang hal ini juga diperoleh dari guru dan ketua KKG PAI sebagai objek pengawasan dan mitra dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru, data ini sebagai informasi untuk menjawab rumusan masalah ke dua dan ke tiga mengenai strategi pengawasan, pelaksanaan, dan faktor penghambat dan penunjangnya, (3) Kepala Sekolah sebagai orang yang memiliki wewenang dalam kebijakan dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan proses pendidikan dilembaga yang dipimpinnya, untuk memperoleh informasi mengenai kondisi objektif profesionalisme dan perubahan yang terjadi setelah dilakukannya rangkaian proses pengawasan sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru, data ini untuk menjawab rumusan masalah ke satu dan ke lima tentang kondisi objektif profesionalisme guru

dan perubahan yang terjadi pada guru PAI Sd di Kecamatan Cileunyi.

Kedudukan informan dalam penelitian kualitatif ini sangat penting. Posisi dan peranan informasi dapat dikatakan sebagai “subjek” yang dapat memberikan informasi primer yang dibutuhkan peneliti. Melihat begitu sentralnya posisi dan peranan informan dalam penelitian, maka penetapan informan pun mutlak membutuhkan seleksi yang tidak sembrangan.

Dalam konteks ini, penentuan informasi disesuaikan dengan berbagai informasi yang dibutuhkan peneliti dengan merujuk kepada kompetensi mereka untuk dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang sedang dikaji.

2) Responden

Responden pada penelitian ini adalah orang yang dapat diwawancarai pada waktu penelitian berlangsung yaitu (1) Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cileunyi, untuk memperoleh data tentang kondisi objektif guru PAI SD di Kecamatan Cileunyi dan perubahan yang terjadi setelah dilakukannya rangkaian proses pengawasan sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru, sesuai dengan rumusan masalah ke satu dan ke lima tentang bagaimana kondisi objektif dan perubahan yang terjadi ada guru setelah dilakukan pengawasan, (2) Pengawas untuk memperoleh data tentang strategi, pelaksanaan strategi pengawasan untuk meningkatkan profesionalisme guru pada guru PAI SD di Kecamatan Cileunyi dan faktor penghambat dan penunjangnya. Selain dari pengawas data tentang hal ini juga diperoleh dari guru dan ketua KKG PAI sebagai objek pengawasan dan mitra dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru, data ini sebagai

informasi untuk menjawab rumusan masalah ke dua dan ke tiga mengenai strategi pengawasan, pelaksanaan, dan faktor penghambat dan penunjannya, (3) Kepala Sekolah sebagai orang yang memiliki wewenang dalam kebijakan dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan proses pendidikan dilembaga yang dipimpinnya, untuk memperoleh informasi mengenai kondisi objektif profesionalisme dan perubahan yang terjadi setelah dilakukannya rangkaian proses pengawasan sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru, data ini untuk menjawab rumusan masalah ke satu dan ke lima tentang kondisi objektif profesionalisme guru dan perubahan yang terjadi pada guru PAI Sd di Kecamatan Cileunyi.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh bukan dari orang, melainkan data dari hasil catatan tertulis yang memiliki relevansinya dengan fokus masalah penelitian meliputi :
- 1) Buku-buku, Tesis, Skripsi yang relevan, mengenai strategi pengawasan dan profesionalisme guru.
 - 2) Dokumen-dokumen resmi secara tertulis tentang strategi pengawasan, profesionalisme guru yang memiliki relevansi dengan fokus masalah penelitian. Sumber data tertulis tersebut nantinya akan dieksplorasi dengan teknik dokumentasi dan kajian kepustakaan yang terdiri dari buku-buku dan majalah ilmiah, arsip dan dokumentasi pribadi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang obyektif, maka ditentukan pula teknik pengumpulan data. Menurut Lofland seperti yang dikutip oleh Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²⁵

a. Observasi

Menurut Suharsimi Arikunto dalam Prosedur Penelitian mengatakan bahwa Observasi diartikan sebagai kegiatan pemusatan perhatian terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Alasan digunakannya teknik ini adalah diduga terdapat sejumlah data yang hanya dapat dilakukan melalui pengamatan langsung ke lokasi penelitian.

Observasi diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian yakni tentang strategi pengawasan dan profesionalisme guru.

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang akurat mengenai strategi pengawasan untuk meningkatkan profesionalisme guru peneliti melakukan observasi dengan melihat langsung oroses pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dilapangan, kegiatan yang peneliti ikuti diantaranya yaitu : (1) kunjungan kelas/observasi kelas, (2) melakukan diskusi dengan siswa, dan (3) melihat supervisi administrasi.

b. Wawancara

Teknik ini dimaksudkan untuk mengangkat data fakta demi fakta yang belum ter gali oleh teknik observasi.²⁶ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*)²⁷ dimaksudkan untuk memperoleh

²⁵Lexy, *Metodologi*, hlm. 157.

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm. 140.

²⁷Lexy, *Metodologi*, hlm. 112.

data berupa pemikiran, konsep dan strategi yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dikerjakan, data-data yang berhasil dikumpulkan baik melalui sumber pokok maupun sumber tambahan, kemudian dilakukan analisis.

Adapun yang menjadi sumber pokok dari penelitian ini penulis peroleh dari buku-buku pendidikan, wawancara dengan kepala SD, Kepala UPTD, Pengawas pendidikan, Ketua KKG Cileunyi, pejabat yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian. Pengambilan dan pengumpulan data yang penulis lakukan akan menjadi bahan yang akan dianalisa, tentunya akan berpijak pada masalah yang akan diteliti yaitu mengenai Strategi pengawasan, dan profesionalisme guru.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan jalan mengumpulkan dan membaca beberapa literatur yang berkaitan dengan strategi pengawasan untuk meningkatkan profesionalisme guru PAI Sekolah Dasar. Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran konseptual tentang peningkatan kompetensi profesional guru, sebagai acuan konseptual dalam melakukan penelitian dilapangan.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data, yaitu data-data yang telah penulis kumpulkan berupa fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, hasil pengamatan di sekolah-sekolah SD di Kecamatan Cileunyi.

Dalam analisa data ini menjelaskan bahwa tujuan analisis data dalam Penelitian adalah menyempitkan dan membatasi penemuan sehingga menjadi satu data yang teratur, tersusun, dan lebih berarti. Analisis

merupakan suatu usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah yang telah disusun. Dalam penelitian kualitas, Moleong menjelaskan bahwa langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data adalah pemerosesan satuan, kategoresasi, dan penafsiran data.²⁸

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif. Berikut ini beberapa tahapan dalam menganalisis data tersebut.

a. Pengumpulan data

Peneliti membuat catatan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang merupakan catatan data lapangan yang berkaitan dengan strategi pengawasan untuk meningkatkan profesionalisme guru PAI Sekolah Dasar di Kecamatan Cileunyi.

b. Reduksi data

Data atau informasi yang diperoleh dari lapangan sebagai bahan mentah direduksi, dirangkum, disusun secara sistematis, dipilih hal-hal yang pokok, atau difokuskan kepada hal-hal yang penting yang relevan dengan subyek penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas atau tajam tentang hasil yang telah diperoleh.

c. Penyajian atau *display* data

Setelah mereduksi data langkah selanjutnya penyajian atau display data. Langkah ini merupakan upaya penulis dalam menyajikan data yang utuh dari data yang diperoleh untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian ini sesuai dengan masalah penelitian dan melihat keterkaitan anantara aspek satu dengan aspek lainnya.

²⁸Marzuki, *Metodologi Riset*, (Jogyakarta : FEUI, 1989), hlm. 87.

d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data

Memverifikasi data serta menarik kesimpulan yaitu menginterpretasikan data atau fakta yang telah diolah lalu dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan teoritis dan normative kemudian ditetapkan sebagai sebuah kesimpulan akhir. Selain itu, pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan memusatkan perhatian kepada focus penelitian yaitu strategi pengawasan untuk meningkatkan profesionalisme guru pada guru PAI Sekolah Dasar di Kecamatan Cileunyi.

G. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan temuan penulis, penelitian tentang pengawasan dan profesionalisme guru telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain :

1. Karya Ilmiah berjudul *Supervisi Pendidikan Madrasah*.²⁹ Substansi pokok yang dibahas dalam karya ilmiah ini (Modul Materi Penataran Pengawas MI dan MTs) adalah : Dasar-dasar pengembangan wawasan pengawas, metode dan strategi supervisi, organisasi dan prosedur kerja, kemampuan psikologi komunikasi serta kepribadian pengawas, profesionalisme pengelolaan madrasah, standarisasi mutu pendidikan, pembelajaran efektif, penelitian tindakan kelas (PTK) dan perencanaan kerja pengawas.
2. Tesis Berjudul *Keefektifan Kinerja Pengawas dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam*³⁰ (Penelitian di SDN Buniayu 2 Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang) tahun 2011. ada di Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil penelitian pokoknya diantaranya :

²⁹Ahmad Zayadi, *Supervisi Pendidikan Madrasah*, (Bandung : IRIS-BEP Depag RI, 2001), hlm. 201.

³⁰Wahyu, *Keefektifan Kinerja Pengawas dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam (Penelitian di SDN Buniayu 2 Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang)*, (Bandung : UIN, 2011), hlm. 206.

a) Program kerja pengawas disusun melalui tahapan : identifikasi masalah, rincian tujuan/sasaran, faktor/komponen yang disupervisi, uraian usaha pengawasan, target/sasaran dan jadwal. b) Pelaksanaan program kerja pengawas mengaplikasikan 5 aspek kegiatan : langkah-langkah pokok, mekanisme kegiatan, bentuk-bentuk usaha, model, teknik dan evaluasi program pengawasan c) Kendala yang dihadapi pengawas : ratio pengawas dengan jumlah sekolah tidak seimbang, lokasi sekolah jauh, kesempatan diklat jarang, biaya perjalanan sedikit, motor inventaris tidak tersedia, dan tidak memiliki kantor. Sedangkan kendala bagi guru PAI : dukungan orang tua masih kurang, tidak adanya diklat pembinaan profesional guru, tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan seperti tidak ada air, tidak memiliki mushala, tidak adanya media audio visual dan kurang biaya, d) Implikasi kinerja pengawas tampak dengan adanya bukti peningkatan kemampuan: kualitas pribadi guru , manajemen pembelajaran, penyelenggaraan kurikulum dan administrasi serta keberhasilan pembelajaran PAI (adanya peningkatan mutu hasil belajar dari segi ranah kognitif, afektif maupun psikomotor), dan perolehan hasil ujian sekolah berstandar nasional (UASBN) T.P 2010/2011 lulus 100% dengan nilai klasifikasi A, nilai rata-rata 7,63, nilai terendah 5,80 dan nilai tertinggi 9,40.

3. Skripsi berjudul Analisis Hubungan Profesionalisme Guru, Motivasi Mengajar dan Kepemimpinan Partisipatif Kepala Sekolah Terhadap Produktivitas Mengajar³¹, menyimpulkan bahwa: ada hubungan antara profesionalisme dengan produktivitas mengajar, ada hubungan antara motivasi dengan produktivitas mengajar, namun dalam penelitian ini tidak ada hubungan antara kepemimpinan partisipatif kepala sekolah dengan motivasi mengajar.

³¹Nurul Indah Setyaningsih, *Analisis Hubungan Profesionalisme Guru, Motivasi Mengajar dan Kepemimpinan Partisipatif Kepala Sekolah Terhadap Produktivitas Mengajar*, (Bandung : UIN, 2011), hlm. 90.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG